

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
MANDATORY DISCLOSURE KONVERGENSI IFRS
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)**

Erni Suryandari F & Dhia Saraswati Savitri

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to discover empirical prove for the effect of managerial ownership, institutional ownership, public ownership, the number of board of commissioners members, the proportion of independent commissioners, and the number of audit committee members on the level of mandatory disclosure with the IFRS convergence of manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2015-2017. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The final sample used for this study was 108 samples. The data analysis technique used was multiple linear regression. Besides that, all variables had been tested on its normality, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity.

The result of the study showed that all variables passed the classical assumption test and appropriate to be used as the research data. The result of the study showed that the institutional ownership, public ownership, and the number of board of commissioners members had positive effect on the level of mandatory disclosure, while proportion of independent commissioners had negative significant effect on the level of mandatory disclosure. Managerial ownership and the number of audit committee members had no significant effect on the level of mandatory disclosure.

Keywords: Mandatory Disclosure, Corporate Governance, IFRS, Managerial ownership, Independent Commissioners.

I. PENDAHULUAN

Laporan tahunan menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan informasi perusahaan lainnya dalam satu periode kepada pihak eksternal atau investor. Para investor menggunakan informasi yang ada pada laporan tahunan sebagai

dasar pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Laporan tahunan harus diungkapkan secara lengkap dan sebaik-baiknya agar mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan perusahaan sehingga mereka tidak salah dalam menginterpretasikan informasi keuangan perusahaan.

Pengungkapan dalam laporan tahunan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Luas pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sangat penting dikarenakan semakin luas informasi laporan keuangan yang dilaporkan maka, perusahaan akan dipandang memiliki kualitas yang baik (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) pada laporan tahunan perusahaan telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/BL/2012 yang berisi tentang penyampaian laporan tahunan perusahaan publik. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) secara rinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS.

Untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan yang telah *go public* di Indonesia, mulai 1 Januari 2012 wajib menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS (Gamayuni, 2009). Pada kenyataannya, penerapan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS belum mampu menjamin terlaksananya kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) oleh perusahaan (Pitasari dan Septiani, 2014). Dalam hal ini

mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) laporan keuangan perusahaan.

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* suatu perusahaan salah satunya adalah dengan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Pitasari dan Septiani, 2014). *Corporate governance* merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan perusahaan, mengingat sering terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan antara pemegang saham dengan direktur (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Selain mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan saham pada perusahaan pun turut mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada laporan keuangan perusahaan. Untuk perusahaan yang telah *go public*, kepemilikan saham perusahaan dapat dimiliki oleh semua kalangan, baik oleh pihak manajemen perusahaan, investor institusional lain, investor asing, pemerintah, serta masyarakat umum (Maharani dan Budiasih, 2016). Semakin banyak pihak yang menanamkan modal saham mereka di suatu perusahaan maka semakin banyak juga pihak investor yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan. Hal ini akan menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan yang diberikan (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* telah dilakukan sebelumnya oleh Prawinandi, dkk (2012), Widjayanti dan Wahidawati (2015), Alvionita dan Taqwa (2015), Gunawan dan Hendrawati (2016), Rahmadhani (2016), Sutiyok dan Rahmawati (2016), serta Fauzia (2017). Pada beberapa penelitian terdahulu, masih banyak ditemukan perbedaan hasil dari masing-masing penelitian. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian ulang mengenai **pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.**

II. TINJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan agensi antara dua orang atau lebih, yaitu hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal adalah pihak yang memberikan amanah kepada agen untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan prinsipal sedangkan agen adalah pihak yang menerima amanah dari prinsipal untuk menjalankan perusahaan (Hamdani, 2016: 17). Asumsi dari teori ini menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu seringkali terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan juga agen (Lukviarman, 2016: 38).

Hubungan antara prinsipal dan agen dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya konflik diantara kedua belah pihak, dimana agen yang telah mendapatkan kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola sahamnya seharusnya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada prinsipal, namun yang seringkali terjadi adalah agen cenderung untuk memikirkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan prinsipal (Hamdani, 2016: 7). Konflik lain yang sering terjadi adalah ketika informasi laporan keuangan yang disampaikan tidak mengungkapkan informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan tugas kepada agen sangat bergantung terhadap informasi keuangan yang diberikan perusahaan karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan agen yang lebih banyak terlibat secara langsung dalam seluruh aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga agen mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perusahaan (Hamdani, 2016: 18). Informasi terkait kondisi perusahaan cenderung dikendalikan oleh agen dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini, agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh prinsipal. Hal ini seringkali menimbulkan asimetri informasi yang erat kaitannya dengan *agency theory* (Kim dan Verrechia, 1994).

2. Teori Stakeholders

Stakeholder adalah suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan tersebut. Dalam teori *stakeholders* dijelaskan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang beroperasi hanya demi kepentingannya sendiri, melainkan perusahaan juga harus mampu memberikan kontribusi kepada para *stakeholder*-nya yaitu pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat, konsumen, dan pihak lainnya) (Gunawan dan Hendrawati, 2016).

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Menurut Haruman (2007) menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibandingkan dengan sekedar mencapai tujuan perusahaan semata. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajemen dinilai dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial akan membuat kepentingan antara pemegang saham dan manajer menjadi sejajar karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dan/atau kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Penelitian Utami, dkk (2012), Fauziah (2016) serta Widjayanti dan Wahidawati (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure*.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* yang efektif sehingga apabila pihak institusional ikut berperan aktif dalam hal pengawasan maka akan meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak lain untuk kepentingan diri sendiri (Cornett & Marcuss, 2006).

Penelitian Utami, dkk (2012), Alvionita dan Taqwa (2015), Fauziah (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

5. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Sebagai perusahaan yang telah *go public*, maka perusahaan telah siap untuk menjual saham perusahaannya kepada publik atau masyarakat luas. Perusahaan harus mampu membuat publik percaya agar mereka mau untuk berinvestasi di perusahaan. Perusahaan harus mampu menampilkan keunggulan dan eksistensi mereka, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure*.

Pemegang saham oleh publik menginginkan informasi perusahaan seluas-luasnya atas kondisi perusahaan (Fauzia, 2017) tujuannya agar publik dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saatnya. Hal ini berdampak pada perusahaan yang dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait dengan perusahaan secara transparan dan seluas-luasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₃ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Dewan komisaris yang besar dapat membantu dalam pemantauan yang lebih dan mengurangi dominasi oleh manajer perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan agar lebih efektif dan dapat mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan sehingga manajemen tidak dapat mendominasi perusahaan dan dapat menghindari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016), serta Gunawan dan Hendrawati (2015) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₄ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

7. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Menurut Johnson et al., (1996) menjelaskan bahwa asumsi dari teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris yang efektif adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi dalam pengelolaan kebijakan dan strategi perusahaan (Maharani

dan Budiasih, 2016). Komisaris independen akan bertindak secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adanya komisaris independen diharapkan perusahaan dapat mengambil kebijakan yang bersifat transparan, akuntabel, adil serta bertanggung jawab baik bagi pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas (Alvionita dan Taqwa, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012), Fauziah (2015), Widjayanti dan Wahidawati (2015) dan Rahmadhani (2016) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₅ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

8. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pengelolaan pelaporan keuangan perusahaan (Lukviarman, 2016: 204). Komite audit mengawasi pengelolaan keuangan perusahaan agar tidak terjadi kecurangan pada laporan keuangan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Semakin besar jumlah komite audit dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan

yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan digunakan investor untuk menilai perusahaan.

Prawinandi, dkk (2012), Pitasari dan Septiani (2014) serta Gunawan dan Hendrawati (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₆ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Model Penelitian

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1KM + b_2KI + b_3KP + b_4UDK + b_5PKI + b_6UKA + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang diukur dengan indeks pengungkapan

a : Konstanta

b₁-b₆ : Koefisien Regresi

KM : Kepemilikan Manajerial

- KI : Kepemilikan Institusional
 KP : Kepemilikan Publik
 UDK : Jumlah Anggota Dewan Komisaris
 PKI : Proporsi Komisaris Independen
 UKA : Jumlah Anggota Komite Audit
 e : error

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	142	144	154	440
2.	Perusahaan yang tidak berturut-turut terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017	(1)	(3)	(13)	(17)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya di BEI pada tahun 2015-2017	(23)	(23)	(23)	(69)
4.	Perusahaan manufaktur yang di dalam laporan tahunannya tidak memenuhi data-data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti	(82)	(82)	(82)	(246)
Total sampel yang diteliti		36	36	36	108

Selama 3 tahun berturut-turut, terdapat 108 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian, yang setiap tahunnya terdiri dari 36 perusahaan.

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	108	,00002	,89444	,0686413	,13936278

KI	108	,01964	1,60737	,6380477	,25144334
KP	108	,01985	,51420	,2375049	,12928111
UDK	108	2,00	12,00	4,0648	1,95880
PKI	108	,167	,667	,39685	,094409
UKA	108	2,00	5,00	3,0833	,45601
MD	108	,45205	,79452	,6149163	,06717026

Variabel MD memiliki nilai minimum sebesar 0,45205; nilai maksimum sebesar 0,79452; nilai rata-rata sebesar 0,6149163; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,06717026. Variabel KM memiliki nilai minimum sebesar 0,00002; nilai maksimum sebesar 0,89444; nilai rata-rata sebesar 0,0686413; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,13936278. Variabel KI memiliki nilai minimum sebesar 0,01964; nilai maksimum sebesar 1,60737; nilai rata-rata sebesar 0,6380477; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,25144334. Variabel KP memiliki nilai minimum sebesar 0,01985; nilai maksimum sebesar 0,51420; nilai rata-rata sebesar 0,2375049; dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,12928111. Variabel UDK memiliki nilai minimum sebesar 2,00; nilai maksimum sebesar 12,00; nilai rata-rata sebesar 4,0648; dan hasil simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,95880.

Variabel PKI memiliki nilai minimum sebesar 0,167; nilai maksimum sebesar 0,667; nilai rata-rata sebesar 0,39685; dan hasil simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,094409. Variabel UKA memiliki nilai minimum sebesar 2,00; nilai maksimum sebesar 5,00; nilai rata-rata sebesar 3,0833; hasil simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 0,45601.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
0,260	Data berdistribusi normal

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,260 > \alpha (0,05)$. Dapat disimpulkan bahwa residual pada data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
KM	0,556	1,799	Tidak terdapat multikolinearitas
KI	0,470	2,126	Tidak terdapat multikolinearitas
KP	0,696	1,436	Tidak terdapat multikolinearitas
UDK	0,839	1,192	Tidak terdapat multikolinearitas
PKI	0,936	1,069	Tidak terdapat multikolinearitas
UKA	0,849	1,178	Tidak terdapat multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, didapatkan hasil bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) semua variabel indepeden kurang dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi	Du	<i>Dw-test</i>	4-du	Keterangan
Durbin-Watson	1,8049	2,170	2,1951	Tidak Terjadi Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 2,170. Nilai antara $dU < dW < 4-dU$, modelnya yaitu $1,8049 < 2,170 < 2,1951$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
KM	,167	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KI	,204	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KP	,711	Tidak terjadi heteroskedastisitas
UDK	,475	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PKI	,497	Tidak terjadi heteroskedastisitas
UKA	,654	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapatkan hasil bahwa setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Tidak ada hubungan antara variabel independen. Dapat disimpulkan pada model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	Adjusted R Square
1	,395

- a. Predictors: (Constant), UKA, PKI, KM, KP, UDK, KI
- b. Dependent Variable: MD

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapatkan hasil bahwa besar koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,395 atau 39,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit sebesar 39,5%. Sisanya sebesar 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

2. Uji nilai *F*

Tabel 4.8
Uji Nilai *F*

Model	Sig
1	,000

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi *F* sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi

komisaris independen dan jumlah anggota komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Uji Parsial (*t*)

Tabel 4.9
Uji Parsial (*t*)

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	,485	,000
KM	,041	,396
KI	,066	,027
KP	,218	,000
UDK	,012	,000
PKI	-,135	,016
UKA	,012	,327

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan rumus model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$MD = 0,485 + 0,041(KM) + 0,066(KI) + 0,218(KP) + 0,012 (UDK) - 0,135(PKI) + 0,012(UKA) + e$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian:

a. Kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,041 dengan nilai signifikansi 0,396 > alpha 0,05. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis pertama (H₁) **ditolak**.

b. Kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,066 dengan nilai signifikansi $0,027 < \alpha 0,05$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

c. Kepemilikan publik terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,218 dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis ketiga (H₃) **diterima**.

d. Jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,012 dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Dari

hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis keempat (H₄) **diterima**.

e. Proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya negatif sebesar 0,135 dengan nilai signifikansi $0,016 < \alpha 0,05$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis kelima (H₅) **ditolak**.

f. Jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Pada tabel 4.9 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,012 dengan nilai signifikansi $0,327 > \alpha 0,05$. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*, sehingga hipotesis keenam (H₆) **ditolak**.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini diduga dikarenakan pada beberapa perusahaan manufaktur, persentase kepemilikan saham oleh manajer jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusional dan publik, sehingga manajer belum dapat mengoptimalkan *mandatory disclosure* pada laporan tahunan perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Menurut Boediono (2005) kepemilikan saham oleh institusi memiliki kemampuan untuk mengurangi perilaku *oportunity* manajer, yaitu perilaku yang membuat manajer mementingkan dirinya sendiri. Dengan besarnya tingkat kepemilikan saham oleh institusional maka pengawasan oleh pihak investor pun semakin besar. Pihak eksternal akan bersikap kritis terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, lengkap, dan juga mendorong perusahaan untuk mematuhi perusahaan untuk mematuhi peraturan dalam pengungkapan wajib yang sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan BAPEPAM-LK (Fauziah, 2016).

Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh publik maka perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan lengkap. Perusahaan yang

memiliki kepemilikan publik maka perusahaan wajib menyampaikan kepada publik, yang merupakan salah satu pemegang saham perusahaan, terkait dengan segala kondisi dan aktivitas perusahaan (Rita dan Sartika, 2013).

Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Besarnya jumlah anggota dewan komisaris yang ada di suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi mudah dan cepat (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini diduga karena jumlah dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dewan komisaris internal, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen masih lemah. Dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh komisaris internal perusahaan dikarenakan anggapan bahwa mereka yang lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini diduga karena jumlah anggota komite audit yang ada pada perusahaan manufaktur rata-

rata hanya terdiri dari 3 orang, sedangkan komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak dan besar sehingga proses pemeriksaan dan pengawasan belum dapat berjalan secara efektif. Menurut Alvionita dan Taqwa (2015) jumlah komite audit yang kecil cenderung meningkatkan kebutuhan akan peran auditor eksternal untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan. Komite audit yang tidak kompeten juga dapat cenderung bergantung kepada auditor eksternal.

VI. SARAN DAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan periode penelitian sehingga dapat membandingkan perbedaan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* tiap tahunnya, menggunakan seluruh perusahaan baik dari sektor keuangan ataupun non-keuangan, meneliti variabel lain di luar variabel penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* seperti ukuran perusahaan, rasio keuangan (likuiditas, profit, leverage), kualitas audit dan lain-lain.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada penelitian ini jangka waktu yang digunakan hanya tiga tahun sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Selanjutnya penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial yang dapat mengurangi banyak sampel penelitian karena tidak semua manajer di perusahaan memiliki saham perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, I., & Taqwa, S., 2015, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure", *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Boediono. G. S., 2005, "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo, 15-16 September 2005, Vol.9, hal. 175-194.
- Cornett M. M., J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H., 2006, "*Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*". <http://papers.ssrn.com/>.
- Fauzia, F., 2017, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fauziah, I., 2016, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2, hal 279-304.
- Gamayuni, Rindu R., 2009, "Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.14, No.2, hal. 153-166.
- Ghozali dan Chariri, 2007, *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. R., 2016, "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.1, No.1, hal 71-83.
- Hamdani, 2016, *Corporate Governance : Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hamzah M. Z., & Suparjan A., 2009, "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal", *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol.9, No.1, hal. 19-33.

- Haruman, Tendi., 2007, “Pengaruh Keputusan Keuangan dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ)”, *The 1st PPM National Conference on Management Research*, hal 1-20.
- Jensen M. C., & Meckling W. H., 1976, “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure”, *Journal of Financial Economics*, Vol.3, No.4, pg 205-360.
- Johnson, R.A., J.L., Daily C.M. and Ellstrand, A.E., 1996, “Boards of Directors: A Review Research Agenda”, *Journal of Management*, vol.22, no.3, pg 409-438.
- Kim, O., & Verrecchia, R. E., 1994, “Market Liquidity and Volume Around Earnings Announcements”, *Journal of Accounting and Economics*, Vol.17, No. 1-2, pg 41-67.
- Lukviarman, N., 2016, *Corporate Governance : Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Era Adicitra Intermedia, Solo.
- Maharani, L. G. P., & Budiasih, I. G. A. N., 2016, “Pengaruh Ukuran, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.1, hal. 34-52.
- Pitasari, A., & Septiani, A., 2014, “Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.2, hal.132-140.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H, 2012, “Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, hal. 20-23.
- Rahmadhani, 2016, “Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rita M, R., & Sartika, 2013, “Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility

(CSR)”, *PhD Thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Kristen Satya Wacana.

Sutiyok, S., & Rahmawati, E., 2016, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.15, No.2, hal. 151-162.

Ujiyantho, M., dan Pramuka, B. A., 2007, “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

Utami, W. D., Suhardjanto, D., & Hartoko, S., 2012, “Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, hal. 20-23.

Widjayanti, S. A., & Wahidawati, W., 2015, “Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.7, hal. 1-21.